

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dapat dilihat dari prosedur pelaksanaan penerimaan kas yaitu Fungsi pihak yang terkait, Dokumen yang digunakan dan Uraian deskripsi prosedur dalam penerimaan kas. Seperti Pengguna Anggaran yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi, Bendahara Penerimaan berfungsi untuk membuat Tanda Bukti Pembayaran yang akan diserahkan kepada wajib pajak/retribusi, Menyetorkan uang yang diterimanya ke Bank beserta Surat Tanda Setoran yang telah dibuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPKD.
2. Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dapat dilihat dari prosedur pelaksanaan pengeluaran kas yaitu Fungsi pihak yang terkait, Dokumen yang digunakan dan Uraian deskripsi prosedur dalam pengeluaran kas.

Seperti Bendahara Umum Daerah berfungsi menganalisa anggaran kas, Kepala SKPD berfungsi menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Membayar (SPM), Bendahara pengeluaran mempersiapkan dan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD melakukan verifikasi atas semua pertanggung jawaban bendahara pengeluaran.

3. Prosedur pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT dalam hal pelaporan pertanggungjawaban kas masih mengalami keterlambatan dikarenakan pengelola program yang terlambat memasukkan panjar dan tidak memperhitungkan waktu yang ada dalam pelaksanaan kegiatan sehingga ini akan berdampak sekali terhadap penyerapan dana pada bulan berikutnya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur maka saran yang diberikan penulis adalah:

1. Untuk terus mengevaluasi prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada setiap jangka waktu tertentu, dengan melihat pada kondisi Dinas, keadaan ekonomi dan kemajuan teknologi sehingga kedepannya diharapkan dapat menciptakan prosedur yang lebih baik lagi dan menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan.

2. Dengan adanya kebijakan-kebijakan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah ditetapkan, sebaiknya selalu dijadikan pedoman dan pengalaman dimasa yang akan datang.
3. Pelaporan pertanggungjawaban kas setiap kegiatan program pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT harus lebih tepat waktu dan akurat baik dari sisi Sumber Daya Manusia maupun aspek-aspek lain yang mempengaruhi pelaporan, sehingga keterlambatan dalam pelaporan pertanggung jawaban dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayundha,Revalia.2011.Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view>. Diakses pada 15 Juli 2017
- Bastian,Indra(2009).*Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta.
- Baswir,Revrison, 1991, **Akuntansi Pemerintah Indonesia**. Edisi Ketiga, Universitas Gadjah Mada. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Baridwan,Zaki, 1991, *Sistem Akuntansi*, Edisi Lima, Universitas Gadjah Mada Penerbit BPE.Yogyakarta
- Halim,Abdul. 2002, **Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah**. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Halim,Abdul. 2007, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Penerbit Alfabeta. Bandung
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2001, **Sistem Akuntansi**. Edisi Ketiga, Universitas Gadjah Mada. Penerbit Salemba Empat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Lelangona,Lidwina Bitu. 2009. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lembata. Universitas Widya Mandira Kupang. Diakses pada 13 Juli 2017
- Olivia,Lahay. 2013.Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi.Mano. Jurnal EMBA.Vol. 1 No.3(2013). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2080/1653>. Diakses pada 13 Juli 2016.Hal 508-518
- _____. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- _____. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

- _____. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. PP No 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*
- Skousen, Smith, Nugroho Widjajanto, 1986. *Akuntansi Intermediate*, Jilid 1, Edisi kedelapan. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono, 2013. **Metode Penelitian Manajemen**. CV alfabeta, Bandung.
- _____. Surat Edaran Nomor SE.900/316/BAKD. *Tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*
- Tanjung, Abdul Hafiz 2009. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD Buku 1*. Salemba Empat. Jakarta
- Tanjung, Abdul Hafiz 2008, **Akuntansi Pemerintah Daerah**. Penerbit Alfabeta Bandung.
- _____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara*
- _____. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004. *Tentang Perbendaharaan Negara*